

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adnan Buyung Nasution, 2017, *Arus Pemikiran Konstitusionalisme*, Kata Hasta Pustaka, Jakarta.
- A. Hamid Attamimi, 1981, *UUD1945-TAP MPR Undang-Undang (kaitan norma hukum ketiganya)*, Jakarta.
- Ahmad Sukardja, 2012, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amieroeddin Syahrif, 2011, *Perundang-undangan Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, Bina Aksara, Jakarta.
- Amrah Muslimin, 2008, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung.
- Arikunto S., 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Arikunto S., 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Aziz Syamsuddin, 2011, *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012, *Buku Pedoman tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah*, Jakarta, dalam http://bphn.go.id/data/documents/pedoman_penyusunan_prolegda.pdf diakses tanggal 15 Agustus 2020.
- Bagir Manan, 1995, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, LPPM Unisba, Bandung.
- , 2011, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta.
- , 2012, *Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Indonesia Hill Co, Jakarta
- , 2013, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945*, UNISKA, Jakarta,
- , 2015, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, LPPM Universitas Bandung, Bandung.
- B. Hestu Cipto Handoyo, 2013, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta Press, Yogyakarta.
- CF Strong, 2004, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, terjemahan dari

Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.

—————, 2006, *Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, The English Book Society and Sidgwick & Jackson Limited, London.

—————, 2014, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Kajian Tentang Sejarah & Bentuk-bentuk Konstitusi Dunia*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.

Fauzan Muhammad., 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*, UII Press, Yogyakarta.

Fred Isjwara, 2009, *Pengantar Ilmu Politik*, Cetakan Kelima, Binacipta, Bandung.

Hambali, 2015, *Ilmu Administrasi Birokrasi Publik*, Yayasan Kodama, Yogyakarta.

Hanif Nurcholis, 2017, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Penerbit PT. Grasindo, Jakarta.

H. M. Busrizalti, 2013, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Total Media, Yogyakarta.

Irwan Soejito, 1989, *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, PT. Bina Aksara, Jakarta.

Irawan Soejito, 2013, *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, Bina Aksara, Jakarta

Jimly Asshidiqie, 2015, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.

—————, 2016, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.

Josep Riwo Kaho, 2012, *Mekanisme Pengontrolan dalam Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah*, Bina Aksara, Jakarta

Miriam Budiardjo, 2010, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.

M. Nasroen, 2010, *Masalah Sekitar Otonomi*, J. B. Wolters, Jakarta

M. Solly Lubis, 2010, *Paradigma Kebijakan Hukum Reformasi*, Sofmedia, Jakarta.

—————, 2010, *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-undangan Mengenai Pemerintah Daerah*, Alumni, Bandung

Maria Farida Indrati Soeprapto, 2010, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta.

—————, 2017, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta,

- Mukti Fajar ND, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta..
- Ni'matul Huda, 2011, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali, Jakarta
- 2014, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI*, Cetakan 1, Nusa Media, Bandung.
- Ronny Hanitijo, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021.
- R. Tresna, Tanpa Tahun, *Bertamasya ke Taman Ketatanegaraan*, Penerbit Dinya, Bandung, hlm. 33, dalam M. Laica Marzuki, 2006, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, Buku Kesatu, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Rozali Abdullah, 2015, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Cet. Ke-I*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sarundajang, 2012, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Siswanto Sunarno, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Soetomo Siswokartono, 2006, *Rekonstruksi Sejarah Kabupaten Pemalang: sebuah studi Penelitian Sejarah Daerah*, Percetakan Daerah, Pemalang.
- Umar Said Sugiarto, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Victor M. Situmorang, Cormentya Sitanggang, 1994, *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tesis/Disertasi

- Agus Budi Setiyono, 2008, Pembentukan Peraturan Hukum Daerah yang Demokratis oleh Pemerintah Daerah, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
- A.Hamid.S. Attamimi 1990, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara – Suatu studi analisis mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan dalam kurun waktu Pelita I – Pelita IV, *Disertasi*, Program Doktor Universitas Indonesia Depok.

- Astim Riyanto, 2016, Aktualisasi Negara Kesatuan Setelah Perubahan Atas Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung
- Fauzan, Muhammad. 2005, Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah Dalam Tata Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia, *Disertasi*, UNPAD Bandung
- Mukhlis, 2014, Fungsi dan Kedudukan Mukim Sebagai Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.

Makalah/Jurnal Ilmiah

- Abdul Wahid, 2008, Himpunan Peraturan Jabatan Fungsional Peraturan Perundang-undangan, *Makalah*, Disampaikan dalam Kata Sambutan sebagai Dirjen Peraturan Perundang-undangan, Jakarta.
- Adithia Anbar Perkasa, Rabina Yunus, Andi M. Rusli, 2013, Analisis Hubungan Eksekutif dan Legislatif dalam Pembuatan Peraturan Daerah di Kota Palopo, *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 6, Nomor 1, Januari 2013 (21-32), ISSN 1979-5645.
- Bhenyamin Hoessein, 2010, Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah, *Jurnal Bisnis dan Birokrasi*, Nomor 1, Volume 1, hlm. 10-11.
- Bhenyamin Hoessein, 2012, Kebijakan Desentralisasi, *Jurnal Administrasi Negara* Volume II, Nomor 2, hlm. 3.
- Eka N.A.M. Sihombing, 2016, Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 NO. 03 - September 2016 : 285 - 296.
- Fahmi Afrizal Kaisupy, Wahab Tuanaya, Marno Wance, 2020, Peran Anggota Legislatif dalam Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, Universitas Pattimura, Kota Ambon, Indonesia, *Jurnal MODERAT*, Volume 6, Nomor 2, ISSN: 2442-3777 (cetak), <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat> ISSN: 2622-691X (online).
- Fahmi Amrusyi, 2012, *Otonomi Dalam Negara Kesatuan*, dalam Abdurrahman (editor), 2012, *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*, Media Sarana Press, Jakarta
- Fauzan, Muhammad. 2005, Peluang Titik Berat Otonomi Pada Daerah Provinsi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, DOI: 10.18196/jmh.2015.0064.1-19, *Jurnal Media Hukum*, VOL. 23 NO.1 JUNI 2016.
- Fauzi Iswahyudi, 2016, Keikutsertaan Perancang Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan

HAM Sumatera Utara, *De Lega Lata, Volume I, Nomor 1, Januari – Juni 2016*.

Kurniawan, 2013, Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. No. 6, Desember, 2013

Muhammad Siddiq Armia, 2016, Eksekutive Review Terhadap Perda Retribusi di Daerah Otonomi Khusus, *Jurnal RechtsVinding*. Vol. 5 No. 2 Desember 2016.

Ramadhany, Irsyadi, 2015, *Peraturan Daerah Kajian Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*. Russmedia Publishing, Yogyakarta.

Sadu Wasistiono, 2004, Kajian Hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Tinjauan dari Sudut Pandang Manajemen Pemerintahan), *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah*, Volume I, Edisi Kedua 2004, hlm. 9, dalam Ni'matul Huda, 2014, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI*, Cetakan 1, Nusa Media, Bandung.

Sindu Galba, 2009, Terbang Kencer Kesenian Tradisional Masyarakat Pemalang Jawa Tengah, *Patrawidya*, Volume 10 No.2 Edisi Juni, 2009.

Siti Masitah, 2014, *Urgensi Prolegda dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 11 No.4 Desember 2014.

Sunaryati Hartono 2012, Pengkajian dan Penelitian Hukum dalam Menunjang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Daerah, *Malakalah*, Bogor

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan